BAB III

ANALISIS

3.1 Latar Belakang dan Sejarah Singkat PT. Kereta Api

3.1.1 Sejarah PT. Kereta Api

Tanpa peran Raja-raja di Jawa, mungkin sebutan Argogede, Argowilis dan Parahyangan serta KA-KA lain tidak terwujud. Maka, keberadaan kereta api di Indonesia tidak lepas dari peran Raja-raja di Jawa. Dengan surat raja (diperkirakan raja Mataram) No 207 tanggal 28 Mei 1842, mengusulkan kepada Pemerintah Hindia Belanda agar membangun jaringan kereta api.

Setelah melalui proses cukup panjang, akhirnya pada tahun 1871, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Bose menyusun rancangan Undang-undang pembuatan jalan kereta api. Pemerintah di Jawa, yang disahkan pada tanggal 6 April 1875, hal ini menandai lahirnya kereta api di bumi nusantara secara de-jure.

Sedangkan secara de-facto, jalan kereta api di Indonesia dibangun oleh perusahan swasta, NV.Nederlandsch Indische Spoorweg Mij (NISM), yang membangun jaringan kereta api dari Kemijen-Tanggung, Jawa Tengah, sepanjang 26 Km. Pembangunan jaringan kereta api ditandai pencangkulan pertama pembuatan badan jalan rel oleh Gubernur Jenderal Belanda Mr. L.A.J Baron Sloet Van De Beele tanggal 17 Juni 1864. Empat tahun kemudian 17 Juni 1968 kereta api lintas Kemijen-Tanggung dapat dioperasikan yang kemudian secara berturut-turut dilanjutkan dengan pembangunan jaringan kereta api di seluruh Jawa, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan bahkan di Sulawesi,

sebelum dipindahkan ke Burma saat penjajahan Jepang yang dikenal dengan Rhomusha.

Sejalan dengan perjalanan sejarah, berkat rahmat Allah SWT dan perjuangan rakyat Indonesia, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dapat dikumandangkan yang diikuti pengambilalihan (Nasionalisasi) secara resmi perusahaan-perusahaan penjajah oleh bangsa Indonesia. Nasionalisasi perusahaan kereta api terjadi pada tanggal 28 September 1945, yang untuk selanjutnya dijadikan sebagai "Hari Kereta Api".

Dengan nasionalisasi tersebut, maka berdirilah perusahaan kereta api pemerintah di Indonesia dengan bentuk perusahaan Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI), yang dipimpin oleh Direktur Djenderal Kepala Djawatan Kereta Api (DDKA), Ir. Mohamad Efendi Saleh.

Setelah berjalan hampir delapan tahun, kepemimpinan tersebut digantikan oleh Ir. R. Abuprayitno, bentuk perusahan berubah menjadi Djawatan Kereta Api (DKA), hingga akhirnya pada tahun 1963, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22/1963, perusahaan berubah status menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA).

Karena situasi politik pada tahun 1965 hingga 1967 cukup genting dengan pecahnya pemberontakan PKI, maka kepemimpinan dipegang oleh ABRI, dengan Brigjen Sentot Iskandardinata sebagai pimpinannya, yang pada tahun 1968 digantikan oleh Ir. Soemali.

Tahun 1971, dengan PP No.61/1971, status perusahaan kembali mengalami perubahan, PNKA diganti PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api). selanjutnya secara berturut-turut pimpinan PJKA dijabat oleh Ir. Pantiarso (1978-

1981), Ir. Soedjono Kramadibrata (1981-1986), Ir. Soeharso (1986-1989), Ir. Harbani (1989-1991), Drs. Anwar Suprijadi, MSc (dengan sebutan Kaperjanka).

Pada tanggal 2 Januari 1991, dengan ditandai pembacaan ikrar karyawan karyawati Perumka, status perusahaan berubah lagi menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) dengan PP 57/1990 tanggal 1 Oktober 1990, dengan Direktur Utamanya Drs. Anwar Suprijadi, MSc. (1991-1995). Kemudian tahun 1995 Direktur Utama Perumka dipimpin oleh Ir. Soemino Eko Saputro (1995-1998). Pada tanggal 31 Juli 1998 Dirut Perumka digantikan oleh Drs. Edi Haryoto.

Pada masa kepimpinan Drs. Edi Haryoto ini, status perusahaan kembali mengalami perubahan. Bentuk perusahaan yang semula Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka), melalui PP No.19 tahun 1998, tanggal 3 Pebruari 1998, berubah status menjadi perusahaan perseroan. PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Selain itu, melalui Keputusan Presiden No 38 tahun 1999, tentang pengecualian perusahaan perseroan tertentu yang dapat dikecualikan dari pengalihan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegang saham atau rapat umum pemegang saham (RUPS) kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (PBUMN), ditetapkan bahwa PT. Kereta Api tetap di bawah naungan Departemen Perhubungan. Kepres yang ditandatangani Presiden Bahrudin Yusuf Habibie tersebut, ditandatangani pada tanggal 17 Mei 1999 menandai mulai diberlakukan status PT, namun demikian secara efektif baru diberlakukan pada tanggal 1 Juni 1999 melalui upacara, sebagai tanda peresmian pengalihan status Perumka menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Kantor Pusat Bandung.

3.1.2 Visi dan Arah Usaha

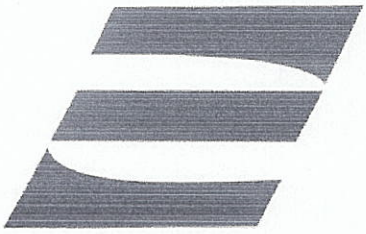
Visi

- PT. Kereta Api Indonesia berkembang menjadi besar
- Memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat
- Memperoleh laba
- Karyawan sejahtera

Arah usaha

Menyediakan pelayanan jasa angkutan Kereta Api bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan dengan memanfaatkan aset berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

3.1.3 Logo PT. Kereta Api



- Makna Karakter Logo

Gambar lambang menyiratkan sifat : tegas, pasti, gerak horisontal, juga bolak-balik. Dua garis lurus dengan ujung lengkung meruncing dengan arah berlawanan, selain menggambarkan arah bolak-balik perjalanan Kereta Api, juga melambangkan interaksi pelayanan (memberi dan menerima)

- Gaya Gambar

Lugas, langsung, tajam, teknis, selaras dengan staf teknis Kereta Api. Ujung garis tajam tapi melengkung untuk menyiratkan arah/kecepatan tetapi

cenderung tumpul agak melengkung, tidak terlampau tajam, agar memberi kesan aman.

- Sifat Gambar

Sifat gambar lebih lugas, obyektif, rasional, karena bentuk geometrisnya lebih dominan dan lebih bersifat maskulin. Memperlihatkan kesan sangat modern, dan teknis.

3.1.4 Falsafah dan Budaya Perusahaan

- Falsafah Perusahaan

Pelayanan yang semakin baik melalui efektifitas dan efisiensi biaya untuk meraih laba.

- Budaya Perusahaan

RELA, yang berarti sikap tulus ikhlas untuk berbuat, berjuang dan berkorban demi kepentingan. RELA juga merupakan akronim dari :

R : Ramah

E : Efisien

L : Lancar dan

A : Aman

3.2 Maksud dan Tujuan PT. Kereta Api

PT.KAI mempunyai tujuan umum yaitu : turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang jasa transportasi darat dan bidang lainnya yang berkaitan dengan transportasi darat.

Adapun misi PT.KAI yaitu menyelenggarakan jasa transportasi sesuai keinginan *stake Holders* dengan meningkatkan keselamatan dan pelayanan serta penyelenggaraan yang semakin efisien. PT.KAI memiliki visi yaitu terwujudnya kereta api sebagai pilihan utama jasa transportasi dengan fokus keselamatan dan pelayanan.

Setiap perusahaan yang berkembang dan bergerak tentu saja mempunyai arah pengusahaan dari perusahaan tersebut. Dengan memberikan pelayanan yang semakin baik melalui efektivitas dan efisiensi biaya untuk meraih laba. Dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa, PT.KAI memiliki budaya perusahaan yaitu RELA, yang berarti bersikap tulus ikhlas untuk berbuat, berjuang dan berkorban demi kepentingan perusahaan.

Dengan berpedoman pada hal-hal di atas, pihak perusahaan dapat melaksanakan rencana dan memberikan pelayanan sesuai dengan visi dan misinya demu memberikan kepuasan bagi para pengguna jasa angkutan kereta api.

Seperti pada perusahaan lain, PT.KAI melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu perusahaan jasa transportasi darat untuk memberikan yang terbaik, baik kepada karyawan karyawatinya maupun para pengguna jasa angkutan kereta api untuk mencapai kesuksesan perusahaan dan menarik para penumpang lebih banyak lagi.

Dengan demikian, PT.KAI dapat mencapai tujuannya yaitu membuat perusahaan menjadi lebih baik dan menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan oleh perusahaan.

3.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Menurut kamus Manajemen (1990, 357) organisasi adalah proses dimana orang-orang dapat bekerja sama kearah pencapaian tujuan-tujuan kelompok.

Struktur organisasi merupakan kerangka kerja yang didalamnya mencakup pembagian kerja dan kegiatan ke dalam bagian-bagian yang ada, baik pada instansi pemerintah, swasta, maupun perusahaan sehingga dapat diketahui dengan jelas koordinasi kerja, uraian tugas setiap posisi, wewenang dan tanggung jawab dari tiap-tiap bagian yang ada dalam perusahaan agar terjalin kerja sama yang baik guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) Nomor : KEP.U/OT.003/XI/03/KA.99 tanggal 08 November 1999 tentang susunan organisasi dan tata kerja tingkat Direktorat, Pusat dan Satuan Pengawasan Intern di lingkungan kantor Pusat PT. Kereta Api (Persero). PT. Kereta Api (Persero) dipimpin oleh seorang Direktur, yaitu :

1. Direktur Keuangan, terdiri dari :
    a. Sub Direktorat Pendanaa
    b. Sub Direktorat Pendayagunaan Keuangan
    c. Sub Direktorat Akuntansi
2. Direktorat Teknik, terdiri dari :
    a. Sub Direktorat Perencanaan Teknik
    b. Sub Direktorat Jalan Rel dan Jembatan
    c. Sub Direktorat Tanah dan Bangunan
    d. Sub Direktorat Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik
    e. Sub Direktorat Balai Yasa

3. Direktorat Operasional dan Pemasaran, terdiri dari :
    a. Sub Direktorat Traksi
    b. Sub Direktorat Pemasaran Angkutan Penumpang
    c. Sub Direktorat Pemasaran Angkutan Barang
    d. Sub Direktorat Diversifikasi Usaha
4. Direktorat Personalia dan Umum, terdiri dari :
    a. Sub Direktorat Perencanaan, Pengembangan Pengendalian Personalia
    b. Sub Direktorat Administrasi Personalia
    c. Sub Direktorat Administrasi Umum, Kerumahtanggaan dan Protokoler
    d. Sub Direktorat Hukum dan Hubungan Antar Lembaga
    e. Sub Direktorat Hubungan Masyarakat
5. Direktorat Pengembangan Usaha, terdiri dari :
    a. Sub Direktorat Investasi
    b. Sub Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Aset Nonproduktif

Daerah Operasi adalah satuan organisasi di lingkungan PT.KAI yang berada di bawah Direksi PT.KAI dan terdiri dari :

1. Daerah Operasi I berkedudukan di Jakarta.
2. Daerah Operasi II berkedudukan di Bandung.
3. Daerah Operasi III berkedudukan di Cirebon.
4. Daerah Operasi IV berkedudukan di Semarang.
5. Daerah Operasi V berkedudukan di Purwokerto.
6. Daerah Operasi VI berkedudukan di Yogyakarta.
7. Daerah Operasi VII berkedudukan di Madiun.

8. Daerah Operasi VIII berkedudukan di Surabaya.
9. Daerah Operasi IX berkedudukan di Jember.

Daerah Operasi (Daop) dipimpin oleh seorang Kepala Daerah Operasi (Kadaop) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada direksi PT.KAI.

Daerah Operasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pegusahaan angkutan kereta api serta merumuskan dan menyusun program pembinaan dan pengendalian pelaksanaan angkutan penumpang atau barang di wilayah Daerah Operasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Daerah Operasi mempunyai fungsi

- Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), pendayagunaan keuangan dan pelaksanaan administrasi kerumahtanggaan dan umum.
- Pelaksanaan pengujian, pengendalian dan pembinaan higiene perusahaan, kesehatan (HIPERKES) dan keselamatan kerja.
- Pemeriksaan kas daerah.
- Pelaksanaan hubungan masyarakat.
- Pelaksanaan dan pengendalian operasi dan pemasaran.
- Pelaksanaan pemeliharaan dan pengendalian sinyal, telekomunikasi dan listrik.
- Pemeliharaan, pengendalian dan penetapan status tanah dan bangunan.

Seksi Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Operasi. Seksi Administrasi mempunyai tugas pokok menyusun program pengelolaan dan evaluasi kinerja sumber daya manusia (SDM), pendayagunaan keuangan, penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan

Daerah Operasi dan akuntansi serta melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan umum.

Seksi HIPERKES dan keselamatan kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah Operasi. Seksi HIPERKES mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian, pengujian dan pembinaan *higiene* perusahaan, kesehatan lingkungan kerja dan keselamatan kerja, serta melaksanakan pengendalian, pembinaan dan evaluasi kinerja Unit Pelayanan Kesehatan di wilayah Daerah Operasi.

Pemeriksaan Kas Daerah dipimpin oleh pemeriksa Kas Daerah yang bertanggung jawab kepada Daerah Operasi. Pemeriksaan Kas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan jadwal dan mekanisme kerja para pemeriksa kas, memimpin pemeriksaan kas stasiun, kas terminal peti kemas, kas restorka dan kas besar serta membantu petugas pemeriksa kereta api (PMKA) dalam melaksanakan pemeriksaan di atas kereta api.

HUMAS dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Operasi. HUMAS mempunyai tugas pokok melaksanakan hubungan masyarakat, penyuluhan di lingkungan perusahaan (internal) dan dengan media massa di luar perusahaan (eksternal).

Seksi Jalan rel dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Operasi. Seksi Jalan rel dan Jembatan mempunyai tugas pokok merumuskan, menyusun dan melaksanakan program pemeliharaan jalan rel, sepur simpang dan jembatan serta mengevaluasi kinerja pemeliharaan jalan rel, sepur simpang dan jembatan.

Seksi Operasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Operasi. Seksi Operasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pengoperasian angkutan kereta api penumpang dan barang.

Seksi Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Operasi. Seksi Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemasaran angkutan penumpang dan barang.

Seksi Operasi dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Operasi. Seksi Operasi dan pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi kinerja operasi dan pemasaran angkutan penumpang dan barang.

Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Operasi. Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan listrik mempunyai tugas pokok merumuskan, menyusun dan melaksanakan program pemeliharaan sinyal, telekomunikasi dan listrik serta mengevaluasi hasil pemeliharaan sinyal, telekomunikasi dan listrik.

Seksi Tanah dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Operasi. Seksi Tanah dan Bangunan mempunyai tugas pokok merumuskan, menyusun dan melaksanakan program pemeliharaan dan inventarisasi tanah dan bangunan.

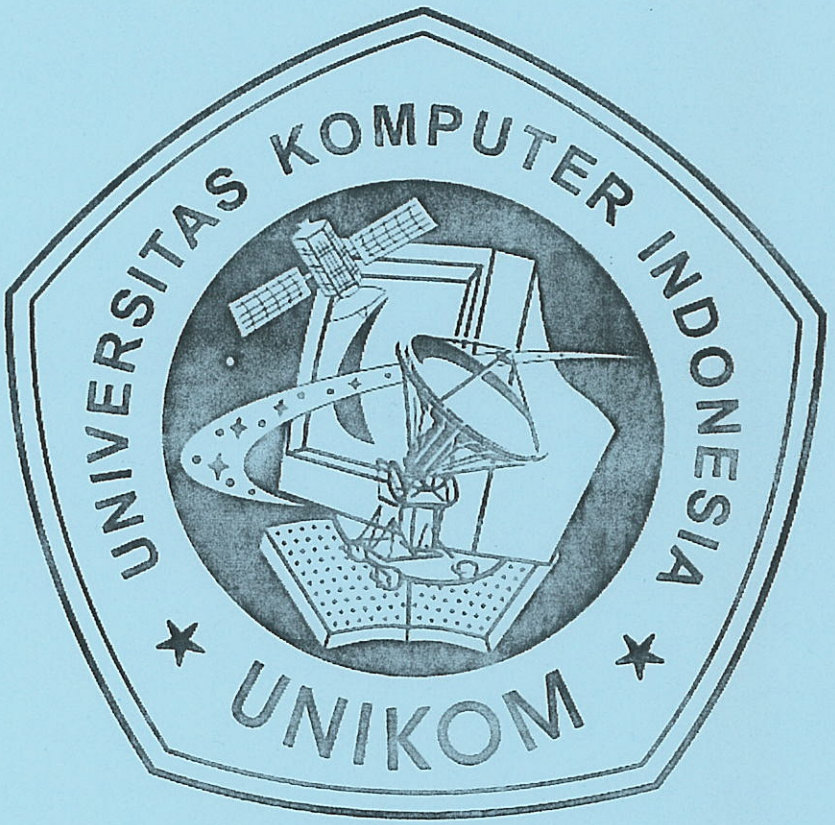
Direktorat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Sub Direktorat, dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat dan dibantu beberapa seksi,

dipimpin oleh Kepala Seksi, serta dibantu oleh beberapa Sub Seksi yang dipimpin oleh Kepala Sub Seksi.

Selain kelima Direktorat tersebut, terdapat pula empat satuan organisasi di lingkungan kantor pusat PT. Kereta Api (Persero), masing-masing dipimpin oleh Kepala Pusat, yang bertanggung jawab kepada Direktur Umum, yaitu :

1. Pusat Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari :
   - Bidang Penyusunan Rencana Jangka Panjang dan Menengah dan Pengembangan Pasar
   - Bidang Sistem Informasi dan Evaluasi Perusahaan
   - Bidang Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana
   - Bidang Penelitian dan Pengembangan Kelaikan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
   - Bidang Bina Program dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan
   - Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Kesekretariatan
3. Pusat Logisitik, terdiri dari :
   - Bidang Perencanaan dan Pengadaan
   - Bidang Inventory dan Pengendalian
4. Satuan Pengawasan Intern

   Dalam struktur organisasi kantor pusat PT. Kereta Api (Persero). Seksi Tata Usaha berada dibawah Sub Direktorat Administrasi Umum, Kerumahtanggaan, dan Protokoler di bawah Direktorat Personalia dan Umum


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM